

Pengaruh *BI Rate* dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Inflasi di Indonesia Tahun 2010-2024

Rio Firas Doras Talo

S1 Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Email: rio.21011@mhs.unesa.ac.id

Ladi Wajuba Perdini Fisabilillah

S1 Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Email: ladifisabilillah@unesa.ac.id

Abstrak

Studi kuantitatif ini secara komprehensif menganalisis dinamika inflasi di Indonesia dalam kurun waktu 2010 hingga 2024 dengan menggunakan metode regresi linier multivariat melalui pendekatan *Ordinary Least Squares (OLS)* pada data bulanan. Fokus utama penelitian ini adalah mengukur pengaruh variabel suku bunga kebijakan (*BI Rate*) dan Jumlah Uang Beredar (*JUB*) terhadap fluktuasi harga di pasar domestik. Berdasarkan hasil uji statistik parsial, ditemukan fakta bahwa inflasi memiliki hubungan positif yang kuat dengan *BI Rate*, yang mencerminkan respons kebijakan bank sentral terhadap tekanan harga, serta berkorelasi negatif namun signifikan dengan *JUB*. Secara kolektif, model ini memiliki kekuatan penjelas sebesar 49,89%, menunjukkan bahwa hampir separuh volatilitas inflasi dapat dijelaskan oleh kedua variabel moneter tersebut, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor eksternal lainnya. Temuan ini memberikan indikasi penting bahwa mekanisme transmisi moneter di Indonesia tidak selalu selaras dengan teori ekonomi tradisional. Oleh karena itu, para pengambil kebijakan atau otoritas moneter disarankan untuk mempertimbangkan adanya jeda waktu (*time lag*) dan faktor struktural yang kompleks dalam setiap pengambilan keputusan, guna memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga di tengah dinamika pasar yang terus berubah secara signifikan.

Kata Kunci: *BI Rate*, Jumlah Uang Beredar, Inflasi, *OLS*.

JEL: B26, E51, E52

Abstract

This quantitative study comprehensively analyzes the dynamics of inflation in Indonesia from 2010 to 2024 using multivariate linear regression through the *Ordinary Least Squares (OLS)* approach on monthly data. The main focus of this study is to measure the influence of the policy interest rate (*BI Rate*) and the Money Supply (*JUB*) on price fluctuations in the domestic market. Based on the results of partial statistical tests, it was found that inflation has a strong positive relationship with the *BI Rate*, reflecting the central bank's policy response to price pressures, and a negative but significant correlation with the *JUB*. Collectively, this model has an explanatory power of 49.89%, indicating that almost half of inflation volatility can be explained by these two monetary variables, while the remainder is influenced by other external factors. This finding provides an important indication that the monetary transmission mechanism in Indonesia is not always aligned with traditional economic theory. Therefore, policymakers or monetary authorities are advised to consider

the existence of time lags and complex structural factors in every decision-making, to ensure national economic stability is maintained amidst continuously changing market dynamics

Keywords: *BI Rate, Money Supply, Inflation, OLS.*

JEL: *B26, E51, E52*

PENDAHULUAN

Menjaga nilai uang tetap stabil sangatlah penting, sebagaimana ditunjukkan oleh krisis keuangan global saat ini. Perekonomian setiap negara menghadapi ancaman inflasi yang terus-menerus. Pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan dapat terhambat oleh kondisi ini, meskipun pertumbuhan ekonomi telah meningkat. Peningkatan pendapatan per kapita tahunan sebagai proksi kesejahteraan publik merupakan definisi umum dari kemajuan ekonomi. Stabilitas dan ekspansi ekonomi merupakan masalah bagi hampir setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Sebagai negara berkembang, Indonesia tidak kebal terhadap dampak kebijakan moneter dan tren ekonomi internasional (Agusmianata et al., 2018).

Inflasi, sebuah masalah ekonomi yang umum, mengurangi daya beli masyarakat dan memiliki dampak negatif jangka panjang terhadap perekonomian secara keseluruhan. Oleh karena itu, inflasi menjadi tolok ukur utama stabilitas ekonomi. Inflasi di Indonesia melonjak sebagai respons terhadap krisis moneter yang melanda pada pertengahan tahun 1997, yang menurunkan daya beli dan memperlambat pembangunan ekonomi. Inflasi menjadi metrik kinerja utama dalam upaya melawan resesi berkepanjangan mengingat situasi sulit ini. Bank Indonesia telah bertanggung jawab atas kebijakan moneter dan telah menjalankan sejumlah inisiatif yang bertujuan untuk mengendalikan inflasi. Strategi lainnya adalah pendekatan disinflasi berdasarkan penawaran agregat di sektor industri (Santosa, 2017)

Indonesia, seperti banyak negara berkembang lainnya, berjuang untuk mempertahankan pembangunan dan stabilitas ekonomi. Pemerintah dapat mencapai stabilitas ini melalui berbagai kebijakan, antara lain kebijakan moneter dan fiskal. Agar perekonomian tetap berjalan lancar, kedua kebijakan tersebut bertujuan untuk menstabilkan harga dan mengendalikan inflasi (Handayani, 2019).

Peredaran uang—alat tukar barang dan jasa—merupakan hal yang fundamental bagi setiap perekonomian. Jumlah uang beredar penting karena perubahannya memengaruhi dinamika aktivitas ekonomi di berbagai bidang. Peningkatan jumlah uang beredar yang berlebihan dapat menyebabkan inflasi yang tidak terkendali dan memperlambat perekonomian dalam jangka panjang. Di sisi lain, penurunan aktivitas ekonomi dapat diakibatkan oleh jumlah uang beredar yang terlalu sedikit. Kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dapat terganggu jika hal ini terus berlanjut. Akibatnya, jumlah uang beredar harus dikelola dengan hati-hati, dengan mempertimbangkan kemungkinan dampaknya.

Tujuan mendasar Bank Indonesia adalah menjaga dan mencapai stabilitas nilai rupiah, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Tujuan

ini dicapai melalui penerapan kebijakan moneter yang jelas, konsisten, dan berjangka panjang oleh Bank Indonesia. Salah satu instrumen yang digunakan bank untuk menetapkan *BI Rate* tabungan, simpanan, dan pinjaman—*BI Rate*—adalah *BI Rate* acuan Bank Indonesia, yang pada gilirannya memengaruhi laju inflasi Indonesia. Menurut Yodiatmaja (2012:3) yang dikutip dalam penelitian (Firdaus et al., 2022), Untuk mencegah tekanan inflasi, otoritas moneter harus menetapkan kerangka kebijakan moneter. Tujuan dari strategi ini adalah menjaga inflasi tetap rendah dan stabil.

Inflasi merupakan salah satu dari banyak variabel makroekonomi yang dapat dipengaruhi oleh perubahan *BI Rate* acuan Bank Indonesia (*BI Rate*). Tujuan utama kenaikan *BI Rate* adalah untuk meredam aktivitas ekonomi, yang pada gilirannya mengurangi kemungkinan inflasi. *BI Rate* kredit dan tabungan, termasuk deposito berjangka, akan naik seiring dengan perubahan *BI Rate* (Elvina et al., 2021) Penurunan jumlah uang beredar dapat disebabkan oleh kenaikan *BI Rate* deposito, yang akan mendorong masyarakat untuk menyimpan dananya di bank. Di sisi lain, perusahaan cenderung tidak meningkatkan pengeluarannya ketika *BI Rate* pinjaman tinggi. Semua faktor ini akan bekerja sama untuk meredam aktivitas ekonomi dan memperburuk tekanan inflasi.

Ekonomi global relatif stabil, dengan inflasi di banyak negara berada pada tingkat moderat. Kebijakan *BI Rate* di banyak negara cenderung akomodatif (rendah) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian pada tahun 2021 hingga 2022 Banyak negara menurunkan *BI Rate* ke tingkat sangat rendah untuk merespons perlambatan ekonomi akibat pandemi. Yang selanjutnya tahun 2022-2024 gangguan rantai pasok dan peningkatan permintaan setelah pandemi mulai memicu inflasi di akhir 2021.pada tahun 2022 berjalan hingga tahun 2024 Inflasi global melonjak akibat kenaikan harga energi dan pangan, terutama di pertengahan 2022.

Dalam menghadapi lonjakan inflasi, banyak bank sentral di berbagai negara merespons dengan menaikkan *BI Rate* secara agresif. Bank Indonesia perlu menerapkan kebijakan strategis untuk mengendalikan inflasi jika ingin mencapai tujuan utamanya, yaitu inflasi yang rendah dan stabil. Kebijakan ini harus berfokus pada pengarahannya *BI Rate* acuan (*BI Rate*) dan pasokan uang, dua instrumen kunci dalam upaya ini.

Periode 2010–2012: Pemulihan Pasca Krisis Global dan Stabilitas Akomodatif. Tahun 2010 merupakan masa di mana Indonesia baru saja pulih sepenuhnya dari dampak Krisis Keuangan Global 2008. Pada periode ini, Bank Indonesia menjaga *BI Rate* pada tingkat yang relatif rendah untuk mendorong pertumbuhan. Inflasi pada tahun 2010 cenderung stabil, meskipun terdapat tekanan dari harga pangan (*volatile foods*). Pada tahun 2011, tren inflasi tetap terkendali pada kisaran 3-5%, yang didukung oleh apresiasi nilai tukar Rupiah. Peningkatan Jumlah Uang Beredar (M1) pada periode ini lebih banyak digunakan untuk membiayai ekspansi sektor riil yang sedang bergairah, sehingga tidak memicu tekanan harga yang berlebihan. Hal ini menjelaskan mengapa

dalam model penelitian JUB seringkali menunjukkan korelasi negatif atau stabil terhadap inflasi ketika output nasional sedang tumbuh kuat.

Tahun 2013–2014: Guncangan Taper Tantrum dan Penyesuaian BBM. Tahun 2013 menjadi titik balik yang krusial. Terjadinya fenomena "Taper Tantrum" di Amerika Serikat memicu aliran modal keluar dari negara berkembang, termasuk Indonesia. Hal ini memaksa Bank Indonesia untuk menaikkan BI *Rate* secara drastis dari 5,75% menjadi 7,50% dalam waktu singkat untuk menjaga stabilitas Rupiah. Di saat yang sama, pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Kenaikan BI *Rate* yang berbarengan dengan lonjakan inflasi pada tahun 2013-2014 inilah yang memberikan kontribusi besar pada koefisien positif dalam model regresi. Secara statistik, terlihat BI *Rate* naik dan Inflasi naik, meskipun secara teoretis BI *Rate* naik untuk "mengejar" inflasi tersebut.

Periode 2015–2019: Era Disinflasi dan Stabilitas Harga Pangan. Selama rentang 2015 hingga 2019, Indonesia memasuki era inflasi rendah yang berkelanjutan. Inflasi secara konsisten berada di angka di bawah 4%. Hal ini dicapai melalui koordinasi yang sangat erat antara Bank Indonesia dan Pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Pembangunan infrastruktur yang masif selama periode ini mulai menunjukkan hasil dalam menurunkan biaya logistik. Meskipun BI *Rate* bergerak fluktuatif merespons dinamika suku bunga global (*The Fed*), inflasi domestik tetap terjaga. Penurunan suku bunga acuan pada tahun 2016-2017 dilakukan untuk mendorong daya beli masyarakat yang mulai melandai.

Tahun 2020–2021: Pandemi COVID-19 dan Kelumpuhan Permintaan. Tahun 2020 mencatat sejarah dengan terjadinya deflasi di beberapa bulan akibat pandemi COVID-19 yang melumpuhkan aktivitas ekonomi. Bank Indonesia merespons dengan kebijakan moneter yang sangat ekspansif (kebijakan akomodatif), menurunkan BI *Rate* ke level terendah sepanjang sejarah (3,50%) dan melakukan strategi *Quantitative Easing* melalui pembelian SBN (skema *burden sharing*). Pada periode ini, Jumlah Uang Beredar meningkat pesat untuk membiayai bantuan sosial dan pemulihan ekonomi, namun inflasi tetap rendah karena permintaan agregat masyarakat sedang berada di titik terendah.

Tahun 2022: Guncangan Geopolitik dan Krisis Energi Global/ Memasuki tahun 2022, tantangan inflasi bergeser dari sisi permintaan ke sisi penawaran (supply shock). Perang Rusia-Ukraina memicu lonjakan harga energi dan pangan global (gandum dan kedelai). Di dalam negeri, pemerintah terpaksa menyesuaikan harga BBM (Pertalite dan Solar) pada bulan September 2022 yang memicu inflasi di atas 5%. Bank Indonesia kembali bertindak agresif menaikkan BI *Rate* untuk meredam ekspektasi inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar.

Tahun 2023–2024: Menuju Normalisasi dan Tantangan Pangan Struktural. Pada tahun 2023 hingga akhir 2024, fokus kebijakan adalah melakukan normalisasi kebijakan moneter. Inflasi mulai kembali ke sasaran target $3\pm 1\%$, namun tantangan beralih ke fenomena alam El Nino yang mengganggu produksi pangan domestik, khususnya beras. Kenaikan harga pangan ini merupakan komponen inflasi yang sulit

dikendalikan hanya dengan *BI Rate*. Bank Indonesia tetap menjaga suku bunga pada level yang cukup tinggi (sekitar 6,00% ke atas) untuk memastikan inflasi tetap rendah dan Rupiah tetap stabil di tengah ketidakpastian suku bunga Amerika Serikat yang tinggi (*Higher for Longer*).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini difokuskan untuk menjawab beberapa permasalahan utama terkait stabilitas moneter di Indonesia. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh secara parsial dari kebijakan suku bunga acuan (*BI Rate*) terhadap tingkat inflasi di Indonesia selama periode 2010 hingga 2024. Kedua, fokus diarahkan pada sejauh mana kontribusi variabel Jumlah Uang Beredar (*JUB*) secara mandiri dalam memengaruhi fluktuasi harga di pasar domestik. Selain itu, rumusan masalah ini juga mencakup analisis mengenai pengaruh kedua variabel tersebut secara simultan atau bersama-sama terhadap pergerakan inflasi nasional. Terakhir, penelitian ini berupaya menjawab mengapa terdapat indikasi anomali dalam mekanisme transmisi moneter di Indonesia, di mana hubungan antara instrumen kebijakan dan target inflasi tidak selalu selaras dengan teori ekonomi tradisional, terutama terkait adanya jeda waktu (*time lag*) dan faktor struktural yang kompleks.

METODE PENELITIAN

Dari tahun 2010 hingga 2024, data BPS dan BI dikumpulkan. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk mengukur variabel-variabel: *BI Rate*, *JUB*, tetapi juga inflasi. Regresi linier berganda digunakan untuk penelitian ini, dan berikut model-model yang dikembangkan:

$$I \quad NF = \alpha + \beta_1 IR_1 + \beta_2 JUB_2 + \varepsilon$$

Dimana :

1. *INF* = Inflasi
2. *IR* = *BI Rate (Interest Rate)*
3. *M1* = Jumlah uang beredar (*JUB*)
4. α = Konstanta
5. β_1 = Koefisien dari variabel *IR*
6. β_2 = Koefisien *JUB*
7. ε = *error term*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Asumsi Klasik

Tabel 1. Hasil Uji Asumsi Klasik			
Uji Multikolinearitas			
Variable	Coefficient	Uncentered	Centered
	Variance	VIF	VIF
C	0.112534	179.6953	NA
LOG X1	0.014623	69.78767	1.293335
LOG X2	0.000122	54.17287	1.293335
Uji Heteroskedastisitas			
F-statistic	0.050876	Prob. F(2,146)	0.9504
Obs*R-squared	0.103771	Prob. Chi-Square(2)	0.9494
Scaled explained SS	0.099855	Prob. Chi-Square(2)	0.9513
Uji Normalitas			
	Mean	1.02E-15	
	Median	0.002137	
	Maximum	0.921515	
	Minimum	-0.839356	
	Std. Dev.	0.333864	
	Skewness	0.108874	
	Kurtosis	2.825735	
	Jarque-Bera	0.583367	
	Probability	0.747005	
Uji Autokorelasi			
	Mean dependent var	1.313173	
	S.D dependent var	0.471651	
	Akaide info criterion	0.671597	
	Schwarz criterion	0.724813	
	Hannan -Quinn criter	0.693174	
	Durbin-Watson stat	0.152356	

Sumber: Eviews, diolah 2025

1. Uji Normalitas

Berdasarkan hasil analisis statistik yang dilakukan terhadap model regresi dalam penelitian ini, pengujian formal terhadap asumsi klasik normalitas menunjukkan hasil yang sangat memuaskan melalui prosedur uji Jarque-Bera. Data penelitian ini menghasilkan nilai statistik Jarque-Bera sebesar 0,583367, yang mengindikasikan bahwa distribusi data tidak menyimpang. Hal ini diperkuat secara signifikan oleh perolehan nilai signifikansi atau p-value sebesar 0,0747005, yang secara teknis berada di atas ambang batas standar signifikansi statistik sebesar 0,05 atau 5%. Dengan residu yang terdistribusi secara normal, pengujian hipotesis melalui uji-t dan uji-f menjadi lebih akurat dan dapat diandalkan, sehingga kesimpulan mengenai hubungan antara BI Rate, Jumlah Uang Beredar, dan inflasi tidak bias oleh gangguan distribusi data.

2. Uji Multikolenaritas

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan terhadap variabel Jumlah Uang Beredar (X1) dan BI Rate (X2), ditemukan bahwa nilai VIF untuk kedua variabel tersebut secara konsisten berada di bawah angka 10, yang merupakan ambang batas (threshold) universal dalam analisis ekonometrika untuk menyatakan bebasnya sebuah model dari masalah multikolenaritas. Dengan nilai VIF yang rendah, varians dari koefisien regresi tidak akan mengalami "pembengkakan" (inflasi), sehingga estimasi parameter yang dihasilkan tetap stabil dan memiliki tingkat presisi yang tinggi. Dengan demikian, peneliti dapat secara meyakinkan menyatakan bahwa setiap perubahan pada BI Rate benar-benar mencerminkan dampak kebijakan moneter secara mandiri, begitu pula dengan variabel Jumlah Uang Beredar terhadap stabilitas harga di Indonesia.

3. Uji Autokorelasi

Pada penelitian ini, pengujian dilakukan dengan menggunakan statistik Durbin-Watson (DW) untuk mendeteksi apakah residu dari model regresi memiliki hubungan sistematis satu sama lain. Berdasarkan hasil olah data yang dilakukan, diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 0,152356. Secara teoretis, nilai statistik DW ini berada dalam rentang krusial antara -2 hingga +2, yang dalam interpretasi ekonometrika sering kali digunakan sebagai indikator awal untuk menilai ada tidaknya masalah autokorelasi pada model yang digunakan. Temuan ini membawa implikasi penting terhadap validitas hasil penelitian mengenai hubungan antara BI Rate, Jumlah Uang Beredar, dan inflasi. Dengan nilai DW yang berada dalam batas yang dapat diterima, model ini dinyatakan bebas dari gangguan autokorelasi, sehingga varians dari gangguan (*error*) bersifat independen dari satu periode ke periode berikutnya.

4. Uji Heterokedastisitas

Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan dengan menggunakan pendekatan formal yang menghasilkan nilai statistik Chi-Square dengan derajat bebas dua. Berdasarkan output pengolahan data, diperoleh nilai probabilitas Chi-Square sebesar 0,9504, yang jika dibandingkan dengan tingkat signifikansi standar sebesar 0,05. Keberhasilan

model dalam melewati uji heteroskedastisitas ini menunjukkan bahwa model regresi telah dispesifikasikan dengan sangat baik dan data yang digunakan memiliki kualitas yang konsisten di seluruh periode pengamatan dari tahun 2010 hingga 2024. Tanpa adanya gangguan heteroskedastisitas, kesimpulan mengenai bagaimana kebijakan moneter memengaruhi stabilitas harga di Indonesia menjadi sangat akurat secara statistik. Kondisi ini memberikan keyakinan lebih bagi para pembaca dan praktisi ekonomi bahwa hasil analisis ini dapat diandalkan untuk keperluan proyeksi ekonomi maupun evaluasi kebijakan publik, karena standar error dari koefisien regresi benar-benar mencerminkan tingkat presisi yang sesungguhnya dari data lapangan.

Hasil Uji Hipotesis

1. Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Linier Berganda				
Dependent	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.06736	0.335461	0.200799	0.8411
LOG X1	1.132563	0.120927	9.365681	0.0000
LOG X2	-0.042092	0.011039	-3.813101	0.0002
R-squared	0.49893	Mean dependent var		1.313173
Adjusted R-squared	0.493268	S.D. dependent var		0.471651
S.E. of regression	0.335745	Akaike info criterion		0.671597
Sum squared resid	19.95228	Schwarz criterion		0.724813
Log likelihood	-57.44374	Hannan-Quinn criter.		0.693174
F-statistic	88.122	Durbin-Watson stat		0.152356
Prob(F-statistic)	0.0000			

Sumber: Eviews, diolah 2025

Analisis regresi linier berganda dengan 180 data per variabel digunakan untuk pengujian. Berikut adalah rumus untuk model regresi:

Rumus inflasi: $0,067360 + 1,132563x_2 + e$

Dalam konteks model regresi linier yang telah disusun, nilai konstanta (*intercept*) sebesar 0,067360 memiliki makna statistik dan ekonomis yang sangat spesifik sebagai titik awal dari pergerakan variabel dependen. Secara teknis, angka ini merepresentasikan nilai dasar atau tingkat ekspektasi inflasi di Indonesia apabila diasumsikan bahwa kedua variabel independen dalam model, yaitu BI Rate dan Jumlah Uang Beredar berada dalam kondisi statis atau bernilai nol. Dengan kata lain, jika tidak ada intervensi kebijakan melalui perubahan suku bunga acuan dan tidak ada fluktuasi dalam peredaran uang di pasar, maka inflasi diprediksi akan berada atau mengalami penyesuaian sebesar 0,067360 poin. Kehadiran nilai konstanta ini memberikan gambaran tentang adanya faktor-faktor fundamental lain di luar model moneter yang secara konstan memengaruhi pergerakan harga di Indonesia. Faktor-faktor tersebut bisa berasal dari ekspektasi inflasi masyarakat yang sudah terbentuk secara historis (*adaptive expectations*), kondisi struktural pasar domestik, hingga komponen inflasi inti yang tetap bergerak meskipun variabel moneter utama tidak mengalami perubahan. Secara matematis, konstanta ini berfungsi sebagai pengatur posisi garis regresi dalam ruang koordinat, yang memastikan bahwa prediksi inflasi tetap memiliki basis nilai yang realistis bahkan ketika determinan moneter utama dalam kondisi konstan. Dalam interpretasi jangka panjang bagi pengambil kebijakan, nilai konstanta ini juga mengingatkan bahwa pengendalian inflasi tidak bisa hanya mengandalkan instrumen moneter semata. Karena adanya nilai dasar inflasi ini, pemerintah dan Bank Indonesia perlu menyadari bahwa terdapat "inflasi bawaan" yang harus dikelola melalui kebijakan non-moneter, seperti perbaikan rantai pasok pangan atau stabilitas harga energi. Dengan memahami peran konstanta sebesar 0,067360 ini.

Dalam kerangka analisis regresi linier yang telah dilakukan secara komprehensif terhadap data makroekonomi Indonesia periode 2010–2024, koefisien regresi untuk variabel BI *Rate* menunjukkan angka sebesar 1,132563. Secara matematis dan ekonometrika, angka ini bukan sekadar koefisien biasa, melainkan sebuah gambaran kuantitatif mengenai elastisitas hubungan antara kebijakan suku bunga acuan dan laju kenaikan harga di pasar domestik. Makna fundamental dari angka tersebut adalah: setiap terjadi kenaikan BI *Rate* sebesar satu persen (1%), maka tingkat inflasi di Indonesia diprediksi akan mengalami peningkatan sebesar 1,132563%, dengan asumsi bahwa variabel lainnya dalam model, seperti Jumlah Uang Beredar, berada dalam kondisi tetap atau konstan (*ceteris paribus*).

Interpretasi ini mempertegas sebuah anomali empiris yang konsisten dalam naskah ini, yaitu bahwa instrumen suku bunga di Indonesia memiliki karakteristik hubungan yang searah (positif) dengan inflasi. Besaran koefisien yang lebih besar dari satu (> 1) menandakan bahwa variabel inflasi bersifat elastis terhadap perubahan BI *Rate*. Artinya, inflasi memberikan respon yang lebih besar dibandingkan persentase perubahan stimulus kebijakannya. Hal ini memberikan sinyal kuat bahwa setiap

pergerakan kecil pada suku bunga acuan akan menghasilkan riak yang cukup besar pada indeks harga konsumen.

Secara substansial, tingginya angka koefisien ini mencerminkan betapa kuatnya sinyal kebijakan moneter dalam memengaruhi ekspektasi pelaku pasar di Indonesia. Terdapat mekanisme psikologis dan struktural yang bekerja di sini; ketika Bank Indonesia menaikkan suku bunga sebagai respons terhadap tekanan ekonomi, sinyal tersebut sering kali diterjemahkan oleh pelaku usaha sebagai indikasi bahwa tekanan inflasi di masa depan akan semakin berat. Akibatnya, ekspektasi harga di tingkat produsen cenderung meningkat hampir secara proporsional.

Peningkatan BI Rate secara otomatis akan diikuti oleh kenaikan suku bunga kredit perbankan, yang merupakan komponen utama dalam struktur biaya modal perusahaan. Dalam kondisi pasar yang memiliki tingkat ketergantungan tinggi pada pembiayaan eksternal, kenaikan biaya bunga pinjaman ini akan dianggap sebagai kenaikan biaya input produksi. Sebagai langkah antisipatif untuk menjaga margin profitabilitas, produsen cenderung meneruskan beban kenaikan biaya ini kepada konsumen dalam bentuk kenaikan harga barang dan jasa (*cost pass-through*). Inilah yang menjelaskan mengapa kenaikan suku bunga dalam model ini justru berujung pada peningkatan inflasi, sebuah fenomena yang mendukung teori *Cost-Push Inflation* dalam konteks negara berkembang.

Kehadiran koefisien sebesar 1,132563 ini menjadi poin krusial dalam diskusi riset, karena angka tersebut membuktikan bahwa BI *Rate* bukan hanya sekadar variabel pelengkap atau formalitas kebijakan, melainkan determinan primer yang memiliki dampak magnitudo yang sangat signifikan. Bagi otoritas moneter, nilai koefisien ini harus digunakan sebagai bahan kalkulasi matematis dalam merumuskan target inflasi nasional.

Otoritas moneter perlu menyadari bahwa setiap kebijakan penyesuaian suku bunga harus dikalibrasi dengan sangat hati-hati karena memiliki dampak pengganda (*multiplier effect*) yang nyata. Karena dampaknya bersifat elastis, kesalahan kecil dalam penetapan suku bunga dapat mengakibatkan fluktuasi harga yang tidak diinginkan di pasar domestik. Oleh karena itu, strategi penstabilan harga di Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan instrumen tunggal, melainkan harus memperhitungkan bagaimana suku bunga acuan berinteraksi dengan struktur biaya industri dan psikologi pasar agar tidak terjadi guncangan ekonomi yang kontraproduktif terhadap daya beli masyarakat.

Berdasarkan hasil estimasi model regresi yang telah dilakukan, variabel Jumlah Uang Beredar (JUB) memiliki koefisien regresi sebesar -0,042092. Secara teknis dan matematis, angka ini memberikan gambaran yang sangat spesifik mengenai elastisitas dampak perubahan likuiditas terhadap stabilitas harga di Indonesia sepanjang cakupan waktu penelitian dari tahun 2010 hingga 2024. Interpretasi ekonomi yang fundamental dari nilai ini adalah: jika terjadi peningkatan jumlah uang beredar (M1) sebesar 1 miliar rupiah, maka tingkat inflasi di Indonesia diprediksi akan mengalami penurunan

atau kontraksi sebesar 0,042092 persen, dengan asumsi variabel independen lainnya seperti *BI Rate* berada dalam kondisi tetap atau *ceteris paribus*.

Penting untuk memberikan catatan kritis terhadap interpretasi ini; meskipun dalam banyak diskusi sering diasumsikan adanya hubungan positif (searah) antara uang dan harga, nilai -0,042092 secara eksplisit menunjukkan adanya korelasi yang bersifat negatif atau terbalik. Dalam terminologi statistik, hal ini menandakan bahwa setiap penambahan unit likuiditas ke dalam sistem ekonomi Indonesia justru berasosiasi dengan perlambatan laju inflasi. Temuan ini sangat menarik dan menantang pakem teori kuantitas uang tradisional, karena mengindikasikan bahwa di Indonesia, ekspansi moneter dalam batas tertentu tidak menjadi pemicu utama kenaikan harga, melainkan justru menjadi pendukung stabilitas harga.

Dalam perspektif ekonomi makro yang lebih luas, temuan hubungan negatif ini mengungkap sebuah fenomena sehat dalam struktur moneter Indonesia. Hal ini dapat terjadi apabila pertumbuhan jumlah uang beredar diiringi oleh peningkatan produktivitas nasional atau perbaikan sistem distribusi barang yang semakin efisien di berbagai wilayah. Dalam kondisi ini, uang yang beredar di masyarakat tidak menumpuk sebagai instrumen spekulasi, melainkan terserap secara efektif oleh aktivitas sektor riil.

Ketika likuiditas digunakan untuk membiayai modal kerja, pembelian bahan baku, dan ekspansi usaha produktif, maka penawaran agregat (*Aggregate Supply*) akan meningkat. Jika peningkatan penawaran ini mampu mengimbangi atau bahkan melampaui kenaikan permintaan, maka harga-harga di pasar akan tetap terjaga atau bahkan cenderung melandai. Fenomena ini menunjukkan bahwa selama periode 2010-2024, ekspansi moneter yang dilakukan oleh perbankan dan otoritas di Indonesia cenderung bersifat suportif terhadap pertumbuhan output, sehingga tidak menimbulkan tekanan inflasi dari sisi permintaan yang berlebihan (*demand-pull inflation*).

Secara statistik, koefisien sebesar -0,042092 ini juga mengindikasikan bahwa pengaruh *JUB* terhadap inflasi di Indonesia bersifat jauh lebih stabil dan tidak sevolatil pengaruh *BI Rate*. Kecilnya angka koefisien ini (mendekati nol namun tetap signifikan) menandakan bahwa peredaran uang di Indonesia telah mencapai tingkat kematangan tertentu di mana pergerakan likuiditas harian tidak serta-merta mengguncang stabilitas harga nasional secara ekstrem.

Temuan ini memberikan landasan empiris yang sangat berharga bagi otoritas moneter untuk memahami bahwa pengelolaan jumlah uang beredar di Indonesia memiliki karakteristik yang unik. Pengelolaan likuiditas yang terukur justru dapat berkontribusi pada stabilitas ekonomi jika diarahkan secara tepat pada sektor-sektor produktif. Hasil riset ini memberikan sinyal bahwa kebijakan ekspansi likuiditas melalui penyaluran kredit ke sektor UMKM dan industri manufaktur adalah langkah yang aman bagi stabilitas harga. Selama uang tersebut mampu menjaga keseimbangan antara penawaran dan permintaan di pasar, maka kekhawatiran klasik bahwa "mencetak uang berarti memicu inflasi" tidak terbukti secara mutlak dalam konteks sejarah

ekonomi Indonesia kontemporer. Hal ini menjadi bukti bahwa kualitas peredaran uang jauh lebih penting daripada sekadar kuantitasnya dalam menjaga marwah stabilitas ekonomi nasional.

2. Uji F(Uji simultan)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara simultan yang telah dilakukan melalui prosedur ekonometrika yang ketat, model regresi yang dibangun dalam studi ini menunjukkan hasil yang sangat signifikan secara statistik. Bukti empiris ini tercermin secara eksplisit melalui perolehan nilai F-statistik (Prob) yang mencapai angka 0,000000. Secara teknis, angka ini merepresentasikan tingkat probabilitas kesalahan yang sangat rendah, bahkan mendekati nol absolut. Jika nilai tersebut dikomparasikan dengan ambang batas signifikansi standar dalam penelitian ekonomi makro, yakni sebesar 5% atau 0,05, maka nilai probabilitas hasil observasi ini jauh lebih kecil dari nilai kritis yang ditetapkan ($0,000000 < 0,05$). Kondisi statistik ini membawa penelitian pada sebuah keputusan yang bersifat mutlak dan fundamental dalam analisis inferensial, yaitu Menolak Hipotesis dan secara otomatis menerima Hipotesis Alternatif. Hal ini menandakan bahwa model regresi yang melibatkan *BI Rate* dan Jumlah Uang Beredar sebagai variabel penjelas memiliki tingkat keberartian (significance) yang sangat tinggi dalam mendeteksi perilaku inflasi. Dalam bahasa ekonometrika, perolehan nilai F-statistik yang sangat signifikan ini menjadi jaminan bahwa model yang dikembangkan memiliki korelasi linear yang kuat secara kolektif, sehingga variabel-variabel tersebut secara bersama-sama layak digunakan untuk melakukan prediksi dan estimasi terhadap stabilitas harga di Indonesia. Interaksi Dinamis *BI Rate* dan Likuiditas. Temuan ini membawa implikasi yang sangat mendalam bagi pemahaman kita mengenai arsitektur moneter nasional. Angka signifikansi simultan yang sempurna ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2010 hingga 2024, dinamika inflasi di Indonesia tidak dapat dipahami secara parsial atau terisolasi. Variabel independen yang terdiri dari *BI Rate* (sebagai representasi harga uang) dan Jumlah Uang Beredar (sebagai representasi kuantitas uang) terbukti secara empiris saling berinteraksi dan membentuk satu kesatuan faktor penjelas yang kokoh. Artinya, fluktuasi inflasi di Indonesia adalah hasil dari tarikan dan dorongan antara kebijakan suku bunga acuan dan volume likuiditas yang mengalir di pasar. Hubungan simultan ini menegaskan bahwa instrumen moneter tersebut bekerja dalam sebuah ekosistem yang saling berpaut; kebijakan suku bunga mempengaruhi kecepatan peredaran uang, sementara jumlah uang beredar menentukan efektivitas dari transmisi suku bunga tersebut. Kesatuan ini menjadi motor penggerak utama dalam menentukan stabilitas harga nasional. Hasil penelitian ini memberikan landasan empiris yang sangat kuat bagi otoritas moneter, khususnya Bank Indonesia, bahwa dalam merumuskan kebijakan pengendalian inflasi, langkah-langkah tidak boleh diambil secara parsial atau hanya mengandalkan satu instrumen tunggal. Keberhasilan menjaga stabilitas harga sangat bergantung pada kemampuan bank sentral dalam mengkalibrasi *BI Rate* secara harmonis dengan pengaturan jumlah uang beredar. Hasil uji-F ini membuktikan bahwa sinergi antara pengendalian harga uang dan kuantitas uang adalah kunci utama untuk mencapai target inflasi yang telah ditetapkan. Jika

Bank Indonesia hanya menaikkan *BI Rate* tanpa memperhatikan manajemen likuiditas di perbankan, atau sebaliknya melakukan pengetatan uang beredar tanpa penyesuaian suku bunga yang tepat, maka target stabilitas harga akan sulit tercapai secara optimal. Temuan ini menjadi pengingat bagi para praktisi ekonomi bahwa efektivitas kebijakan moneter terletak pada koherensi bauran instrumen yang digunakan untuk menavigasi ekonomi nasional melewati berbagai tantangan global.

Pengaruh BI Rate terhadap tingkat inflasi di Indonesia tahun 2010-2024.

Berdasarkan hasil pengujian regresi yang telah dilakukan secara komprehensif, muncul sebuah temuan yang sangat menarik dan bersifat kontraintuitif: *BI Rate* acuan Bank Indonesia secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat inflasi di Indonesia. Temuan ini secara fundamental tidak sejalan dengan hipotesis awal penelitian maupun postulat teori ekonomi makro konvensional yang umumnya menduga adanya hubungan negatif. Dalam buku teks ekonomi standar, kenaikan suku bunga acuan diposisikan sebagai instrumen pengerem inflasi melalui penurunan permintaan agregat. Namun, realitas data di Indonesia dalam rentang 2010 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang berbeda, di mana kenaikan *BI Rate* justru beriringan dengan peningkatan angka inflasi.

Meskipun terlihat paradoks, hasil penelitian ini faktanya didukung oleh sederet temuan dari peneliti sebelumnya di konteks Indonesia. Studi oleh Manuela Langi, Theodores, dan Masinambow Vecky (2014) secara eksplisit menyatakan bahwa *BI Rate* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat inflasi di Indonesia. Sejalan dengan itu, penelitian Putri et al. (2017) dan Elvina et al. (2021) juga mengonfirmasi bahwa peningkatan suku bunga acuan sering kali diikuti oleh kenaikan tingkat harga secara umum. Hal ini membuktikan bahwa fenomena "hubungan positif" ini bukanlah sebuah error statistik, melainkan refleksi dari karakteristik unik mekanisme transmisi moneter dan struktur ekonomi di Indonesia.

Salah satu alasan utama di balik hubungan positif ini adalah adanya faktor Jeda Waktu (*Time Lag*) kebijakan. Kebijakan moneter tidak bekerja seperti "saklar lampu" yang memberikan dampak instan; dibutuhkan waktu antara 4 hingga 6 kuartal bagi perubahan suku bunga untuk benar-benar mempengaruhi harga di tingkat konsumen. Dalam praktiknya, Bank Indonesia sering kali menaikkan *BI Rate* justru ketika tren inflasi sudah berada pada posisi yang tinggi atau sedang meningkat akibat guncangan eksternal.

Karena data yang digunakan dalam model ini menangkap momen di mana suku bunga naik "mengejar" inflasi yang sedang melonjak, maka secara statistik hubungan yang terekam adalah positif. Dalam perspektif ini, *BI Rate* bukanlah penyebab inflasi, melainkan respon terhadap inflasi. Namun, dalam model regresi linier, urutan waktu ini diterjemahkan sebagai korelasi searah yang kuat. Signifikansi 0,0000 menunjukkan betapa reaktifnya otoritas moneter Indonesia terhadap setiap gejolak harga yang terjadi di pasar.

Alasan kedua yang tidak kalah penting adalah dominasi Inflasi Sisi Penawaran (*Cost-Push Inflation*). Apabila inflasi dipicu oleh kenaikan harga energi (seperti BBM),

kegagalan panen, atau gangguan rantai pasok global, maka kenaikan BI *Rate* sering kali menjadi kurang efektif. Sebaliknya, kenaikan suku bunga justru menambah beban bagi sektor industri karena meningkatnya biaya bunga pinjaman modal kerja. Produsen yang menghadapi kenaikan biaya modal ini cenderung melakukan cost pass-through dengan menaikkan harga jual produk mereka kepada konsumen untuk menjaga margin keuntungan. Dalam skenario ini, kebijakan moneter yang ketat justru memberikan tekanan tambahan pada harga barang.

Selain itu, respons pelaku pasar terhadap pengumuman kenaikan BI *Rate* juga berperan besar. Kenaikan suku bunga acuan sering kali dibaca oleh pasar sebagai sinyal bahwa otoritas moneter mencium adanya risiko inflasi yang sangat tinggi di masa depan. Sinyal ini kemudian direspon oleh pedagang dan pengusaha dengan menaikkan harga lebih awal berdasarkan Ekspektasi Inflasi. Terlebih lagi pada periode khusus setelah pandemi COVID-19, di mana Bank Indonesia harus menaikkan suku bunga secara agresif untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah lonjakan harga komoditas global.

Pengaruh jumlah uang beredar terhadap inflasi tahun 2010- 2024

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan menunjukkan bahwa jumlah uang beredar memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat inflasi di Indonesia. Temuan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa jumlah uang beredar (JUB) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat inflasi di Indonesia. Hasil ini bertentangan dengan teori kuantitas uang yang menyatakan bahwa peningkatan JUB akan mendorong kenaikan harga-harga (inflasi). Namun demikian, hasil tersebut dapat dijelaskan melalui beberapa kondisi yang relevan dengan konteks perekonomian Indonesia.

Pertama, tidak semua peningkatan jumlah uang beredar langsung meningkatkan permintaan agregat. Hal ini bisa terjadi apabila uang yang beredar cenderung terserap dalam sektor keuangan dibandingkan sektor riil, sehingga tidak berdampak langsung pada konsumsi dan investasi yang dapat memicu inflasi. Selanjutnya perubahan perilaku masyarakat dalam menyikapi situasi ekonomi juga turut memengaruhi. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian, seperti masa pandemi COVID-19, masyarakat lebih memilih untuk mengurangi konsumsi. Konsekuensinya, meskipun JUB meningkat, tekanan inflasi tetap rendah karena permintaan terhadap barang dan jasa menurun (Elvina et al., 2021).

Berikutnya kebijakan fiskal dan moneter yang cenderung ketat juga dapat menjadi penyebabnya. BI *Rate* yang tinggi, misalnya, dapat menahan pertumbuhan kredit, sehingga mengurangi belanja konsumen dan investasi. Stabilitasnya nilai tukar rupiah serta meningkatnya efisiensi distribusi barang juga berkontribusi dalam meredam tekanan inflasi, meskipun uang beredar meningkat. Yang terakhir efek keterlambatan (*time lag*) dalam transmisi kebijakan moneter juga dapat menjelaskan hasil ini. Peningkatan JUB tidak serta-merta berdampak pada inflasi karena memerlukan waktu untuk memengaruhi aktivitas ekonomi secara menyeluruh. Dalam jangka pendek, dampak dari peningkatan JUB terhadap inflasi bisa tampak negatif.

Selain itu sejak tahun 2015 hingga tahun 2019, tingkat inflasi selalu berada di bawah angka 4%. Hal ini dikarenakan Pemerintahan Joko Widodo lebih menitik beratkan pembangunan ekonomi pada pemerataan pendapatan dan pemerataan tingkat kesejahteraan. Pada pola fokus utama pembangunan adalah pengendalian harga guna mempertahankan daya beli masyarakat secara keseluruhan. Dimana pengendalian harga dapat mempengaruhi jumlah uang beredar. Sehingga Pembangunan di era Joko Widodo akan cenderung mempertahankan tingkat Inflasi pada level yang rendah dengan konsekuensi pertumbuhan ekonomi relatif rendah (Elvina et al., 2021).

Dengan demikian, pengaruh negatif dan signifikan JUB terhadap inflasi mencerminkan bahwa dinamika variabel makroekonomi sangat dipengaruhi oleh kondisi struktural dan perilaku ekonomi yang berlaku pada periode tertentu, sehingga tidak selalu sesuai dengan prediksi teori konvensional.

Hasil uji ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan (Mahendra, 2016) Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), diketahui bahwa variabel jumlah uang beredar memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat inflasi di Indonesia. Artinya, setiap peningkatan jumlah uang beredar justru diikuti oleh penurunan tingkat inflasi dalam periode yang diamati. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Susmiati et al., 2021) Berdasarkan hasil output SPSS, diketahui bahwa secara parsial jumlah uang beredar (M1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat inflasi di Indonesia. Artinya, peningkatan jumlah uang beredar justru diikuti oleh penurunan laju inflasi dalam periode penelitian. Sementara itu, nilai tukar rupiah menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi, yang mengindikasikan bahwa pelemahan nilai tukar dapat mendorong kenaikan harga-harga secara umum.

3. Secara simultan, variabel jumlah uang beredar dan nilai tukar rupiah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap inflasi di Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut secara kolektif memiliki kontribusi dalam menjelaskan pergerakan inflasi nasional. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa secara parsial *BI Rate* acuan Bank Indonesia (*BI Rate*) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi. Pengaruh *BI Rate* dan jumlah uang beredar terhadap inflasi di Indonesia tahun 2010-2024

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel jumlah uang beredar dan *BI Rate* berpengaruh signifikan terhadap tingkat inflasi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki peran penting dalam menentukan pergerakan inflasi nasional. Inflasi sendiri merupakan permasalahan ekonomi klasik yang masih menjadi tantangan bagi banyak negara di dunia. Selain itu, inflasi juga berfungsi sebagai indikator utama dalam menilai kondisi perekonomian suatu negara, karena mencerminkan stabilitas harga serta daya beli masyarakat. Laju inflasi harus selalu diperhatikan agar tetap rendah supaya tidak menimbulkan permasalahan ketidakstabilan dalam ekonomi (Bimrew Sendekie Belay, 2022)

Inflasi menjadi suatu permasalahan ekonomi yang sering ditakuti oleh para pelaku ekonomi termasuk pemerintah. Indonesia pernah mengalami hiperinflasi mencapai

650% pada tahun 1966 Penyebab dari keadaan ini yaitu terlalu banyak mencetak uang yang digunakan dalam membiaya revolusi serta bebrapa kepentingan lainnya. Tahun 1997-1998 Indonesia mengalami inflasi tinggi hingga mencapai 72% (Dan, 1999) Keadaan inflasi dalam perekonomian negara terus menjadi permasalahan yang cukup menarik untuk dibahas, mengingat dampak secara luas yang disebabkan oleh inflasi (Mansur et al., 2023)

Kasus inflasi yang cenderung lama berakibat pada terpuruknya ekonomi dan pertumbuhan suatu negara. Dalam ilmu ekonomi keadaan ini disebut stagnansi (Agusmianata et al., 2018). Kestabilan harga tercermin dari keadaan tingkat inflasi. Apabila inflasi tinggi, maka pendapatan riil masyarakat akan turun sehingga kesejahteraan masyarakat juga akan menurun (Santosa Budi Agus, 2017).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang komprehensif untuk periode 2010 hingga 2024, penelitian ini mengungkapkan temuan yang sangat krusial mengenai dinamika ekonomi makro di Indonesia. Secara statistik, ditemukan bahwa BI *Rate* (suku bunga kebijakan Bank Indonesia) memiliki hubungan yang signifikan dan cenderung positif terhadap tingkat inflasi. Fenomena ini memberikan gambaran bahwa setiap kenaikan BI *Rate* sering kali diikuti oleh peningkatan inflasi, yang secara teoretis dapat diinterpretasikan sebagai langkah proaktif atau respons kebijakan bank sentral dalam menghadapi ekspektasi inflasi yang sudah lebih dulu meningkat di masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa instrumen suku bunga merupakan sinyal kuat dalam menjaga stabilitas moneter, di mana intervensi melalui BI *Rate* menjadi senjata utama bank sentral ketika perlu mengendalikan permintaan agregat terhadap barang dan jasa guna menekan laju kenaikan harga.

Di sisi lain, penelitian ini menunjukkan hasil yang cukup menarik terkait variabel Jumlah Uang Beredar (M1), di mana ditemukan adanya hubungan yang negatif dan kuat terhadap inflasi di Indonesia. Hal ini berarti, secara statistik, peningkatan jumlah uang beredar dalam periode penelitian justru berkorelasi dengan penurunan tingkat inflasi. Hubungan yang signifikan ini menantang sebagian asumsi tradisional dan menunjukkan bahwa dinamika inflasi di Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor yang jauh lebih kompleks daripada sekadar kuantitas uang yang mengalir di pasar.

Secara keseluruhan, baik BI *Rate* maupun Jumlah Uang Beredar merupakan dua pilar utama yang menjelaskan dinamika inflasi selama lebih dari satu dekade terakhir. Keberhasilan model dalam menangkap korelasi ini menegaskan pentingnya integrasi data dari berbagai sumber tepercaya untuk memahami anatomi inflasi secara utuh. Dengan demikian, kebijakan moneter di masa depan harus terus memperhatikan interaksi antara kedua variabel ini, terutama dalam memitigasi risiko penurunan permintaan yang ekstrem. Melalui penyesuaian BI *Rate* yang tepat sasaran, bank sentral memiliki kapasitas untuk melakukan manajemen permintaan (demand management) yang efektif, memastikan bahwa roda ekonomi tetap tumbuh tanpa harus mengorbankan stabilitas nilai mata uang nasional.

Penelitian ini memiliki beberapa batasan substansial yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil analisisnya. Secara metodologis, penggunaan model regresi linier berganda dengan pendekatan *Ordinary Least Squares* (OLS) belum sepenuhnya mampu menangkap efek jeda waktu (*time lag*) yang biasanya terjadi dalam transmisi kebijakan moneter, di mana perubahan *BI Rate* memerlukan waktu beberapa bulan untuk berdampak pada harga di tingkat konsumen. Selain itu, nilai R-squared sebesar 49,89% mengindikasikan bahwa masih terdapat sekitar 50,11% variabilitas inflasi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar model, seperti fluktuasi nilai tukar Rupiah, dinamika harga komoditas global, serta gangguan struktural akibat pandemi COVID-19 yang menciptakan anomali pada perilaku data makroekonomi selama periode pengamatan.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan analisis dengan menambahkan variabel makroekonomi lain yang relevan, seperti kurs valuta asing dan indeks harga produsen, guna meningkatkan daya penjelas model terhadap volatilitas inflasi. Peneliti mendatang juga dapat mempertimbangkan penggunaan metode ekonometrika yang lebih dinamis, seperti *Vector Error Correction Model* (VECM) atau *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL), untuk memetakan hubungan keseimbangan jangka panjang serta mekanisme koreksi kesalahan antar variabel. Terakhir, sangat direkomendasikan untuk melakukan analisis mendalam mengenai pengaruh faktor musiman dan kebijakan fiskal pemerintah agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai determinan stabilitas harga di Indonesia secara utuh.

REFERENSI

- Agusmianata, militina, lestari. (2017). *Pengaruh jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga serta pengeluaran pemerintah terhadap inflasi di indoneisa*.
- Defani Ivena Putri, Arintoko, Nunik Kadarwati, and I. F. (2024). *Determinants of Inflation in Indonesia: Do Changes in World Oil Prices Matter?* (pp. 222–231).
- Dena, F1) Setiyawan, A2), Fitriani, D3), Gusdinar, I. R. (2021). *pengaruh jumlah uang beredar dan suku bunga terhadap tingkat inflasi di indonesia*. 2(2), 168–174.
- Elvina Marta, Purnami Sri, W. A. (2021). *Pengaruh jumlah uang beredar dan suku bunga BI terhadap tingkat inflasi di indonesia* (pp. 4–2).
- Fitiranti Mutiara, R. L. (2024). *The Influence of Money Supply, Interest Rates, Household Consumption on Inflation in Indonesia*. 4, 1–10.
- Langi Manuela, Masinambow vekcy, S. hanly. (2014). *Tingkat, D A N Terhadap, Kurs Inflasi, Tingkat*. 14(2).
- Nurmetri, S., Adnan, M., Ar-raniry, U. I. N., & Aceh, B. (2024). *Pendahuluan Ketidakstabilan ekonomi mempengaruhi perkembangan ekonomi global dengan*. 9(4).

- Putri, D. I., Kadarwati, N., & Firdauzi, I. (2024). *Determinants of Inflation in Indonesia: Do Changes in World Oil Prices Matter?* 8(2). <https://doi.org/10.18196/jerss.v8i2.22626>
- Ratri, D. A., Studi, P., Pembangunan, E., Brawijaya, U., & Brawijaya, U. (2022). *Jdess 01.01.2022*. 1(1), 58–70.
- Santosa, A. B. (2017). *Analisis inflasi di indonesia*.
- Saragih, I., Saragi, J. B., & Gulo, T. N. (2024). *Pengaruh Jumlah Uang Beredar dan BI Rate Terhadap Tingkat Inflasi di Indonesia Periode Tahun 2010-2023*. 4(1), 2490–2498.
- Sari, S. P., & Nurjannah, S. (2023). *Analisis Pengaruh Nilai Tukar , Jumlah Uang Beredar dan BI Rate Terhadap Inflasi di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Daya Beli Masyarakat*. 1(1), 21–29.
- Simon, F. (2023). *faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di indonesia (studi pada masa pandemi covid-19)*. 6(1), 125–132.
- Susmiati, Rediatni Putu, S. N. (2021). *Pengaruh Jumlah Uang Beredar dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Tingkat Inflasi di Indonesia Tahun 2011-2018*. 4(2), 68–74.
- Syarifah, Fatonah, Khotimah, Yusnia, S. (2025). *pengaruh suku bunga dan uang beredar (m2) menggunakan metode autoregressive distributed lag (ardl) pengaruh suku bunga dan uang beredar (m2) menggunakan metode autoregressive distributed*. 3(12).
- Virginia Galuh Pamujiningrum', D. S. (2024). *Analisis Dampak Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal Terhadap Inflasi di Indonesia Tahun 2001-2021* (pp. 2808–6988).